



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 114 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN TALEGONG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Talegong Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Talegong Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TALEGONG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 114**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 114 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA  
KECAMATAN  
TAHUN 2023**

**KERJA  
TALEGONG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

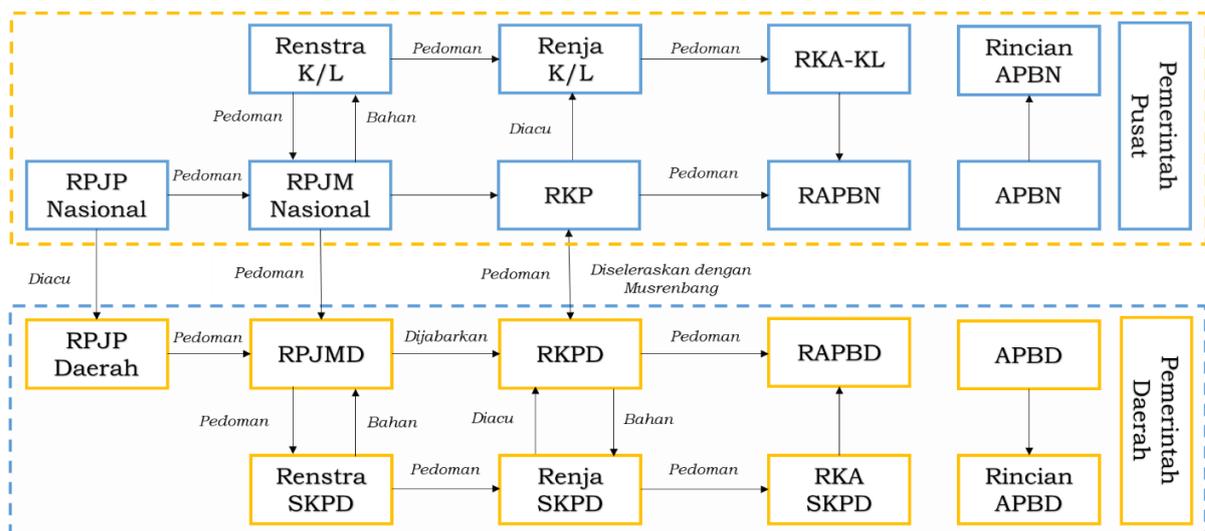
Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Talegong Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir

Renja. Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Talegong Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Talegong Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. bahwa Renja Talegong merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga

memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Talegong Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk

sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan Talegong telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan Tema **Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan RKPD Tahun 2022**, yaitu “ **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat** “.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja

Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ ***Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat***” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Talegong Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Talegong tahun 2023.

## **2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang dan Tugas, Fungsi Tata Kerja Kecamatan;
32. Surat Keputusan Camat Talegong No. KU.0102/198-Kec/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2023;

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Talegong tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Talegong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Talegong tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Talegong ;

3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **3. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Talegong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### 1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 3. Maksud dan Tujuan

###### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

###### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - 1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan  
Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Talegong sudah disahkan.
  - 1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu  
Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;  
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
  - 3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - 3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
  - 3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
  - 3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

- 4.1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3. Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Talegong Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Talegong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Talegong tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Talegong Tahun 2022 antara lain :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semestetran SKPD.
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 1) Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 3) Pengadaan Mebel.
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
  - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penataan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Lainnya.
- 3) Pemeleiharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Aset Tanah/Bangunan lainnya.

1.8. Penataan Organisasi.

- 1) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan Pihak ketiga

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan

- 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di wilayahKecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yaitu;

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Talegong 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Talegong dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 28 Kegiatan terdapat 6 (enam) Kegiatan (18.11%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak

memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (96,31%)
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD (92,85%)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (99,30%)
4. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (95,97%)
5. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (96,56%)
6. Kegiatan Pengadaan Meubeuler (99,90%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan 2021**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	9.516.659	96,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1.435.000	1.088.380	92,85
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000	16.385.000	99,30
4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.070.000	32.060.000	95,97
5	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	69.521.700	96,56
6	Pengadaan Meubeler	70.528.200	70.312.200	99,90

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Talegong dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 28 Kegiatan terdapat 22 (dua puluh dua) Kegiatan (81,89%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
12. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum yang melibatkan pihak Swasta
14. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
16. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
19. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan
22. Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan 2021**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	10.729.500	10.729.500	100,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.028.500	6.028.500	100,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.658.300	13.658.300	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.657.800	11.657.800	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.669.600	2.669.600	100,00
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	32.175.000	32.175.000	100,00
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.657.000	191.178.8000	100,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.620.000	4.620.000	100,00
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.248.400	10.248.400	100,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.841.500	22.841.500	100,00

12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.226.000	135.226.000	100,00
13	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum yang melibatkan pihak Swasta	25.000.000	25.000.000	100,00
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.461.200	20.461.200	100,00
15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	22.984.200	22.984.200	100,00
16	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.600.000	80.600.000	100,00
17	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.325.000	3.325.000	100,00
18	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	100.000.200	130.000.200	100,00
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.517.499	55.809.899	100,00
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.734.000	71.000.000	100,00
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	115.226.000	135.226.000	100,00
22	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	50.000.000	50.000.000	100,00

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Talegong

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
  - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Talegong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Talegong tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Talegong pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Talegong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Talegong .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

## 1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Talegong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Talegong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Talegong tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82.75</b>	<b>102.16</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		BB	<b>100.00</b>	

### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Talegong tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Talegong. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Talegong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi

Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

Nama SKPD : Kecamatan Talegong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Urusan Wajib								
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan								
7	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %
7	01	23 01 002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	62,82 %	100 %	62,82 %	100 %	62,82 %
7	01	23 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan di lingkungan kantor	100 %	69,51 %	100 %	69,51 %	100 %	69,51 %
7	01	23 01 008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23 01 009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00
7	01	23 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	99,84 %	100 %	99,84 %	100 %	99,84 %
7	01	23 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	87,87 %	100 %	87,87 %	100 %	87,87 %
7	01	23 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai	100 %	92,86 %	100 %	92,86 %	100 %	92,86 %
7	01	23 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	95,83 %	100 %	95,83 %	100 %	95,83 %
7	01	23 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/ Administrasi	Terpenuhinya Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Dalam Pelayanan	100 %	99,38 %	100 %	99,38 %	100 %	99,38 %



## **2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Talegong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Talegong Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82	82,5	82,5	82.3	83	82,75		83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			80	85	90	95	100	100	100	-	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	A-	A-	A	BB	B	A-	

### **3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Talegong Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Talegong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan

*Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Talegong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan

Talegong (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Talegong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Talegong sebesar Rp. 8.000.684.600-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Talegong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Talegong mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Talegong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pda tabel T-C.31 sebagai berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Talegong**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Talegong  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Talegong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target							
7																	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7	01									8,000,684,600				8,110,334,800			
7	01	01								6,910,234,600				6,915,984,800			
7	01	01	2.01							49,000,000				56,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencana an SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan ( Renstra,Renja) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 90 B	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	20,000,000

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya Dokumen Perencana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Tersusnya Dokumen Perencana an SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusnya Dokumen Perencana	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	0
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusnya Dokumen Perencana an SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya Dokumen Perencana an SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 90 B	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	6,000,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 90 B	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1,951,499,800</b>		<b>2,057,000,000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target	Tolok Ukur	Target						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	01 Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneri	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	17 Orang/bul an	17 Orang	1,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokum en Admini	0 1	2,000,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01 Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang meneri ma qaii	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	1 Laporan	17 Orang	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokum en Admini strasi	0 1 %	15,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	01 Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo h Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ranener	adumla h Orang yang mener	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	12 Laporan	17 Orang	38,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokum en Admini strasi Keuang	0 1 %	42,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>24,000,000</b>		<b>34,000,000</b>		

7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 85 10	12 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	100 %	12,500,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 85 10	12 Laporan	1 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	100 %	12,500,000

7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Laporan	1 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	100 %	9,000,000
---	----	----	------	----	---	---	--	--	---------------------------------	----------	------------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	----------	-----------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>39,484,800</b>			<b>42,484,800</b>				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	25 Paket 100 %	1 Laporan	12,484,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	100 %	12,484,800

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan		10 0 %	3 Orang 3 Orang	1 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	1 0 0 %	15,000,000
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	10 0 %	1 Dokumen 240 Orang	1 Laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	1 0 0 %	15,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>580,500,000</b>			<b>515,500,000</b>			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	5 Jenis	12 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	9,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Item pengadaan Kebutuha Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	37 Jenis	12 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	120,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Jenis	12 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	60,000,000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Paket	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	2 Paket	12 Dokumen	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	12,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	88 eksemplar	12 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Paket	12 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	200,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1060 Orang	12 Dokumen	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	48,000,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang yang melaksanakan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi Umum	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Laporan 400 Orang	12 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	60,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>3,069,750,000</b>					<b>3,020,000,000</b>	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Pengadaan Kendaraan beroda 2	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	2 unit	1 Laporan	74,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	0
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah jenis Pengadaan kendaraan Roda 4 Jumlah Pengadaan kendaraan Operasioanl Roda 4	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Mobil 1 Unit	1 Laporan	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	320,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan kebutan mebel	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit 6 Jenis	1 Laporan	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	225,000,000

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	6 Unit 90 B	1 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	225,000,000
---	----	----	------	----	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	-------	----------------	-----------	-------------	--------------------------------------	--	-------	-------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit	1 Laporan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	500,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	3 unit 3 Unit	1 Laporan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	1,000,000,000

7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	3 Jenis	1 Laporan	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	750,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>64,000,000</b>			<b>59,000,000</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Tagihan air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 12 bulan	3 Dokumen	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	24,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 100 %	3 Dokumen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	7,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pembayaran Jasa tenaga kebersihan dan Tenaga Operator komputer Non ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 2 Orang	3 Dokumen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	27,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1,132,000,000</b>			<b>1,132,000,000</b>	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	10 Unit 10 unit	1 Laporan	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	32,000,000
---	----	----	------	----	---	--	---	---	---------------------------------	-------	--------------------	-----------	------------	--------------------------------------	--	-------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Pemeliharaan lanjutan Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit 500 M2	1 Laporan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	500,000,000

7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjan	Jumlah Pengadaan GOR/Sarana Olah Raga Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 unit 1 Unit	1 Laporan	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	600,000,000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>343,000,000</b>		<b>363,000,000</b>		
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>195,000,000</b>		<b>205,000,000</b>		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Laporan 90 B	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinas Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	60,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Peningkatan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Dokumen 4 Kegiatan	2 Dokumen	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinas Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	145,000,000
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>48,000,000</b>		<b>48,000,000</b>		

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	6 Jenis pelayanan 12 Laporan	1 Laporan	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100 %	48,000,000
7	01	02	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>								<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan Penataan Ibu kota Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Lokasi	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	50,000,000
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit 90 B	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100 %	60,000,000

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>235,500,000</b>			<b>270,500,000</b>		
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>62,500,000</b>			<b>67,500,000</b>		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa Jumlah kegiatan Musrenbang	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan	Kab. Garut, Talegon g,	100 %	7 Dokumen 1 Kegiatan	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	100 %	35,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Talegon g, Sukamul ya	100 %	7 Kegiatan 0 Laporan 1 Laporan	1 Laporan	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32,500,000
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>48,000,000</b>			<b>53,000,000</b>		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kab. Garut, Talegon g, Sukamul ya	100 %	1 Kegiatan 1 Laporan	1 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun		
		Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	0 Laporan 1 kegiatan	2 Kegiatan	66,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan	100 %	72,000,000
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>182,100,000</b>					<b>190,000,00</b>
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>182,100,000</b>					<b>190,000,00</b>

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah pelaksanaan kegiatan Bimtek Wawasan kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Talegon, Sukamulja	100 %	500 Orang 7 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada	100 %	50,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forpimcam	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Kab. Garut, Talegon, Sukamulja	100 %	12 Dokumen 12 bulan	2 Kegiatan	132,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	100 %	140,000,000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>153,350,000</b>		<b>178,850,000</b>		
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>153,350,000</b>		<b>178,850,000</b>		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegon, Sukamulja	100 %	7 Dokumen 7 Kegiatan	1 Laporan	19,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	27,450,000

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut, Talegon, Sukamul	100 %	7 Dokumen 7 Kegiatan	1 Laporan	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	26,400,000
---	----	----	------	----	--	---------------------------------	--	--	------------------------------	-------	-------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Laporan	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,500,000
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	7 Laporan 7 Kegiatan	1 Laporan	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,500,000

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35,000,000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Desa	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Laporan Kegiatan TP PKK Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 12 Laporan	1 Laporan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	32,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Persentase Desa Berkinerja baik	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Desa	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>8,000,684</b>				<b>8,110,334,</b>	

## **5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Talegong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Talegong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C. 32  
 Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah  
 Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Talegong

N O	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEG PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN/ DESA	VOLUME	PAGU	SKPD PENANGGUNGJ AWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN									
Desa Mekarmukti									
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Meningkatkan Sarana Informasi dan Komunikasi	Pembangunan Tower	Desa Mekarmukti	1 Paket	600.000.000	Diskominfo
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Penetapan Batas Wilayah Desa	Pembangunan Batas Desa	Desa mekarmukti	4 Unit	100.000.000	DPMD
3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan		Peningkatan fasilitas sarana Musyawarah	Pembangunan Balai Sawala RW	4 Kedusunan	8 Unit	240.000.000	DPMD

	Aparatur	amanah							
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Untuk ketertiban Tanah admintrasi pertanahan	Pelayanan AKTA Tanah Masal	Desa Mekarmukti	1000 Buah	200.000.000	DPMD
5	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Meningkaktan keamanan dan Kenyamanan	Pembangunan PJU	4 Kedusunan	25 Tititk	375.000.000	DISHUB
6	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah		Fasilitas Kegiatan Musyawarah di desa	Pengadaan Soud sistem	Desa Mekarmukti	1 Paket	200.000.000	Diskominfo
7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pemagaran dan TPT SDN Mekarmukti 1		2 Lokal	200.000.000	Dina Pendidikan
8	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pembangunan kantor MI ASYFA	Kp. Nenglasari RT.03/RW.05	1 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan

	serta pemuda dan olah raga								
9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan TPT SMPN 2 TALEGONG	Kp.Babakan Anyat RT 01/RW 04	200 m2	200.000.000	Dinas PUPR
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemagaran MI ASYFA	Kp. Nenglasari RT.03/RW.05	100 M	150.000.000	Dinas Pendidikan
11	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Untuk Keamanan Lingkungan Sekolah	Pemagaran SDN I Mekarmukti	KP.Bunikasih RT 01 RW 01	200 M2	150.000.000	Dinas Pendidikan
12	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Pembangunan	Rehab TK PGRI 3	Kp.Babakan Anyat RT 01/ RW. 04	56 m2	150.000.000	Dinas Pendidkan

13	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi ruang kelas RA ASFA	Kp. Nenglasari RT.03/RW.05	1 Unit	100.000.000	Dinas Pendidikan
14	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peningkatan Kinerja	Insentif Guru Paud dan TK	Desa Mekarmukti	20 orang	50.000.000	SETDA
15	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Untuk Keamanan Lingkungan Sekolah	Pemagaran SMPN 2 Talegong	Kp.Babakan Anyat RT 01 rw 04	250 m	250.000.000	Dinas Pendidilan
16	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pemagaran RA ASYFA	kp. Nenglasari RT.03/RW.05	20 M	75.000.000	Dinas Pendidikan
17	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah			Peninkatan Kualitas kesehatan	pembangun an pos yandu	Kp. Banyuwangi RT.02/RW.06	1 Unit	50.000.000	kesehatan

	raga								
18	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	TPT Madrasah ma'rifatullo h	Kp. Datar kupa RT.02/Rw.05	50 M <sup>3</sup>	100.000.000	PUPR
19	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pembangun an madrasah al- islah	Kp. Cipalaya RT.01/RW.07	1 Unit	150.000.000	PUPR
20	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Untuk Bermain Anak	Pengadaan Alat Bermain TK PGRI 3	Kp.Babakan Anyat RT 01/RW. 04	1 Paket	50.000.000	Dinas PUPR
21	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pemagaran TK al- mustofa	Kp. Tutugan RT.02/RW.08	1 Unit	30.000.000	PUPR

22	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Meningkatkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Bantuan Alat Kesenian	Desa Mekarmukti	4 Unit	80.000.000	Disparbud
Desa Sukalaksana									
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik	Pemekaran Wilayah	Desa Sukalaksana	2 Desa	250.000.000	DPMD
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik	Pengadaan Pengers Suara	Desa Sukalaksana	8 Unit	80.000.000	DISKOMINPO
3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik	Pembutan Gapoura Batas Desa	Desa Sukalaksana	1 Paket	100.000.000	PUPR
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan kinerja aparatur			Pelayanan Publik	Penertiban Tanah Warga Desa	Desa Sukalaksana	2900 sppt	75.000.000	BAPENDA
5	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah			Pengadaaan Sarana Prasarana Budaya	Pengadaan Alat Tradisional dan Modern	Tiap Dusun Desa Sukalaksana	8 Paket	150.000.000	DISPORA

	raga								
6	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Pengadaan Alat Olah Raga	Desa Sukalaksana	8 Paket	80.000.000	DISPORA
7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Pembinaan Lembaga Adat	Penyuluhan Konvergensi Stunting	Desa Sukalaksana	51 Orang	500.000.000	DINKES
	Desa Mekarmulya								
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	PENGADAA N GENSET	Desa Mekarmulya	1 UNIT	5.000.000	SETDA
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	PENGADAA N KOMPUTER	Desa Mekarmulya	5 UNIT	25.000.000	SETDA

3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	PENGADAA N MEBELER BPD, LPM, Karang Taruna dan Kelembagaa n Lainnya	Desa Mekarmulya	5 SET	25.000.000	SETDA
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	PENGADAA N SOUND SYSTEM	Desa Mekarmulya	1 UNIT	20.000.000	SETDA
5	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pengadaan CCTV	Desa Mekarmulya	1 UNIT	10.000.000	SETDA
6	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangun an RUTILAHU	DESA MEKARMULY A	40 UNIT	600.000.000	PERKIM
7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PEMBANGU NAN PONDOK PESANTRE N	RW.08 Cibaliung	1 Unit	200.000.000	DEPAG
8	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Ambulan Desa	DESA MEKARMULY A	1 Unit	200.000.000	DINAS KESEHATAN

9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangun an Ruang Belajar MDT Al-Munajat Cigembong	RW.06 Cigembong	1 Unit	100.000.000	DISDIK
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran dan Penataan Lapang Sepak Bola	RW.01 Genteng	1 Unit	300.000.000	DISPORA
11	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Alat Seni Tradisional	DESA MEKARMULY A	3 UNIT	300.000.000	DISBUDPAR
Desa Sukamulya									
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Pelayanan Publik	Penataan / Pemekaran Wilayah	Desa Sukamulya	2	250.000.000	DPMD
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Pelayanan Publik	Pemutihan Tanah warga/SPP T	Desa Sukamulya	480 lbr	150.000.000	BAPENDA/BPN

3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Pelayanan Publik	Sertifikasi Tanah Adat	Desa Sukamulya	500 bdg	300.000.000	BPN
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Pelayanan Publik	Sertifikasi Tanah redis/Land reform	Desa Sukamulya	250 bdg	200.000.000	BPN
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana			Pelayanan Publik	Pembebasan Lahan Kritis	Ciwaru, Nangewer Desa Sukamulya	20 Ha	4.000.000.000	BPN/PEMDA
6	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja				Pembangunan RUTILAHU	4 Dusun di Desa Sukamulya	40 KK	600.000.000	DINSOS/PERKIM
7	Peningkata nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya				Pembangunan wisata curug luhur	Kp. Cibatu Desa Sukamulya	1 unit	400.000.000	DISBUDPAR
8	Peningkata nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya				Pembangunan wisata curug ngelay	Kp. Pasir Tando Desa Sukamulya	1 unit	400.000.000	DISBUDPAR

9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan lapang sepak bola	Kp Talegong Desa Sukamulya	5000 m	650.000.000	DISPORA
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan RKB PAUD/TK	Nengewer, Lembur kari, Dt. Belendung	4 unit	900.000.000	DISDIK
11	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehab Total SDN 3 Sukamulya	Datar Belendung Desa Sukamulya	9 unit	1.200.000.000	DISDIK
12	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehab Total SDN 4 Sukamulya	Kp. Cikiruh Desa Sukamulya	3 unit	750.000.000	DISDIK
	Desa Mekarwangi								

1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pengadaan Gmset	Desa Mekarwangi	1 Paket	12.000.000	APBD KAB
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pengadaan Desa Digital	Desa Mekarwangi	1 Paket	20.000.000	APBD PROV
3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Rehab Kantor Desa	Desa Mekarwangi	1 Unit	500.000.000	APBD PROV
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pengadaan Peralatan Kantor	Desa Mekarwangi	1 Paket	50.000.000	APBD KAB
5	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pembangunan Gapura Batas Desa	Desa Mekarwangi	1 Paket	100.000.000	APBD PROV
6	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan MCK SDN Mekarwangi 1	Desa Mekarwangi	1 Paket	50.000.000	APBD PROV

7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan air bersih tingkat Desa	Desa Mekarwangi	1 Paket	45.000.000	APBD KAB
8	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan MCK Desa	Desa Mekarwangi	1 Paket	45.000.000	APBD KAB
9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan MCK SMP ma,arif	Desa Mekarwangi	1 Paket	50.000.000	APBD PROV
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Air Bersih SDN Mekarwangi 1/2	Desa Mekarwangi	1 Paket	75.000.000	APBD KAB
11	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan MCK Madrosah Mursidul Palah	Desa Mekarwangi	1 Paket	50.000.000	APBD PROV

12	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangun an MCK SDN Mekarwangi 1	Desa Mekarwangi	1 Paket	50.000.000	APBD PROV
13	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangun an Ruang Belajar PAUD Kp. Cikopeng Hilir	Desa Mekarwangi	1 Paket	100.000.000	APBD KAB
14	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangun an MCK Lingkungan	Desa Mekarwangi	4 unit	100.000.000	APBD KAB
15	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi rumah jompo yang sudah tida layak huni/Rutila hu	Desa Mekarwangi	20.unit	200.000.000	APBD KAB
	Desa Selaawi								
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Untuk meningkatkan Pelayanan	Pengadaan Laptof dan Printer	Desa Selaawi	12 Unit	120.000.000	Disdik

2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	Penambahan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Selaawi	12 Orang	432.000.000	DPMD
3	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Untuk meningkatkan Pelayanan	Pengadaan Laptop dan Printer BPD	Desa Selaawi	5 Unit	50.000.000	Disdik
4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Untuk meningkatkan Pelayanan	Pengadaan Mobiler	8 RW	8 Paket	8.000.000	DPMD
5	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Untuk meningkatkan Pelayanan	Penyediaan Insentif Linmas	Desa Selaawi	15 Orang	90.000.000	DPMD
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana			Meringnkan beban masyarakat yang terdampak Bencana	Penyediaan Tanah untuk Relokasi Bencana	Desa Selaawi	1 Ha	1.000.000.000	Dinas Perkim
7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana			Mempercepat Informasi	Pengadaan Alat Tanggap Darurat Bencana	Desa Selaawi	1 Paket	50.000.000	BPBD

8	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Mempermudah Informasi	Pembangunan Gapura Batas Desa	Desa Selaawi	4 Unit	60.000.000	DPMD
9	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Meningkatkan Kinerja Pengurus	Penyediaan ATK untuk Bale Sawala Kampung KB Awi Manggung	Kp. Selaawi III RW 02	1 Paket	20.000.000	DPPKBPPPA
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Meningkatkan Kinerja Petugas	Insentif Sub Pos KB	Desa Selaawi	9 Orang	54.000.000	DPPKBPPPA
11	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketrentaman dan ketertiban serta politik dan demokrasi			Meringankan beban keluarga yang di tinggalkan	Penyediaan Santunan Kematian	Desa Selaawi	50 Paket	25.000.000	Dinas Sosial
12	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Tersedianya sarana yang memadai	Pembangunan MCK Ponpes Asyukur	Kp. Sawah Tengan RT 03/05	1 Unit	50.000.000	Dinas Perkim

13	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Membantu Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Alat P 3 K	Desa Selaawi	100 Paket	50.000.000	Dinas Kesehatan
14	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Tersedianya prasarana Olahraga yang memadai	Penyediaan Alat Olahraga Volly	Desa Selaawi	8 Paket	8.000.000	Dispora
15	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja			Tersedianya Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Desa Selaawi	10 KK	100.000.000	Dinas Sosial
16	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Tersedianya sarana Olahraga yang memadai	Pembangunan GOR Volly Indor	Kp. Selaawi Desa Selaawi	1 Unit	1.000.000.000	Dispora
17	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur			Peningkatan SDM Pokja	Pelatihan Sub Pos KB Desa	Desa Selaawi	9 Orang	6.000.000	DPPKBPPPA
	Desa Sukamaju								

1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur				Pembentukan / Pemekaran Desa	Desa Sukamaju	1 PAKET	250.000.000	DPMD
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur				Pembangunan sekretariat RT/RW	Desa Sukamaju	1 PAKET	40.000.000	DPMD
3	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja				Insentif Dasawisma	Desa Sukamaju	1 PAKET	500.000	DPMD
4	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja				Pembangunan RUTILAHU	Desa Sukamaju	50 unit	1.250.000.000	SEKRETARIS DAERAH
5	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga				Pembangunan Madrasah	Desa Sukamaju	1 PAKET	200.000.000	SEKRETARIS DAERAH
6	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, budaya gotong royong, ketrentaman dan ketertiban serta				Pembangunan rumah ibadah	Desa Sukamaju	1 PAKET	200.000.000	SEKRETARIS DAERAH

	politik dan demokrasi								
				Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan RKB	SMPN 3 TALEGONG	1 PAKET	1.000.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN I Sukamaju	6 RUANG	150.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Sukamaju	6 RUANG	150.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 3 Sukamaju	6 RUANG	150.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi Ruang Kelas	MI AL AZKIYA	6 RUANG	150.000.000	DISDIK

	raga								
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan APE dalam dan APE luar	TK PGRI 5 TALEGONG	1 PAKET	50.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan APE dalam dan APE luar	KB AL-AZMI SUKAMAJU	1 PAKET	50.000.000	DISDIK
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Peninkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan APE dalam dan APE luar	KB AL-AZKIYA SUKAMAJU	1 PAKET	50.000.000	DISDIK
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN									
Desa Mekarmukti									
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah			Peningkatan Infrastruktur	Pengaspala n jalan desa	kp. Cisuren s/d kp. Tutugan Desa	7 KM	800.000.000	PUPR

	secara merata			Daerah		Mekarmukti			
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase Jalan Protokol Desa	Kp. Cisuren s/d kp. Tutugan Desa Mekarmukti	7.100	500.000.000	PUPR
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Drainase/T PT Lapang Sepak Bola	Kp. Bunikasih Rt.001/001	150 x 1,5 m	250.000.000	PUPR
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan sarana air bersih	Kedusunan Bunikasih	1,5 KM	250.000.000	PUPR
5	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Rabat Beton Cibogoan	Kp. Cibogoan Rt.002/004	300 m	450.000.000	PUPR
6	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT	KP. CIPARI RT.01/RW.07	150 M	200.000.000	PUPR
7	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran dan pengerasan jalan lingkungan kp. Neglasari s/d kp.	kp. Neglasari s/d kp. datar kopo RT. 03/RW.06 Desa Mekarmukti	2.500 M	250.000.000	PUPR

					datar kopo				
8	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Mekarmukti	50 unit	850.000.000	Perkim
9	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Sasak kp. Banyuwangi	Kp. Banyuwangi RT.02/RW.06	1 Unit	200.000.000	PUPR
10	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan gorong-gorong	Kp. Banyuwangi Rt.02/Rw.06	10 Unit	100.000.000	PUPR
11	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT jalan kedusunan cipari	Kp. Ciengang RT.04/RW.05	200 m2	200.000.000	PUPR
12	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	pembangunan TPT KP. DATAR HAUR	kp.datar haur rt.01/rw.05	80M3	200.000.000	PUPR
13	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT DATAR KUPA	kp. Datar kupa RT.02/Rw.05	100M3	150.000.000	PUPR

14	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pengaspalan jalan kedusunan mekarbakti	kp. Cibogoan s/d kp. Banyuwangi	4 KM	500.000.000	PUPR
15	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT Kp. Pasir geulis	kp.pasir geulis RT.01/RW.06	80M3	200.000.000	PUPR
16	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	pembangunan TPT Kp. Banyuwangi	kp.pasir geulis RT.02/RW.06	80M3	200.000.000	PUPR
17	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran jalan kp. Banyuwangi s/d kp. Tutugan	Kp. Banyuwangi Rt.02/Rw.06	1000 m2	150.000.000	PUPR
18	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan sasak kp cipalaya	KP. CIPALAYA RT.01/RW.08 Desa Mekarmukti	1 Unit	150.000.000	PUPR
19	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan Sawah Lame	Kp. Datar Muncang Rt.002/003 Desa Mekarmukti	1 Unit	200.000.000	PUPR
20	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jaling Cibereng	Kp. Cibereng Rt.003/004	500x 2,5	200.000.000	PUPR

21	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran dan Pengerasan Jaling	Kp. Citamiang Rt.001/003	500 M	200.000.000	PUPR
22	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan jembatan Ranca Tugu	Kp. Ranca Tugu Rt.003/002	3 x 2	200.000.000	PUPR
23	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Mesjid Al-Munawaroh	Kp. Situ Leles Rt.003/001	25 x 2	200.000.000	PUPR
24	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran Jaling	Kp. Datar Kalapa s/d Pasir Pogor	2 km x 2,5 M	500.000.000	PUPR
25	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Jalan Kedusunan	Kp. Ranca Limus s/d Bunikasih	1,5 KM	200.000.000	PUPR
26	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pipanisasi Kp. Cilukut	kp. Nenglasari Rt.03/Rw.06	1000 M2	350.000.000	kesehatan
27	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Tempat Wisata Cipanas	Kp Cijulang Rt 03 Rw 03	1 Paket	500.000.000	Disparbud
28	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan Arum	Rahong s/d Cipari Desa	1.500	500.000.000	Disparbud

				Daerah	Jeram	Mekarmukti			
29	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Irigasi Banyu Hurip I	Kp. Cipari s/d Bunikasih Desa Mekarmukti	5 Km	500.000.000	PUPR
30	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pelebaran/ Pengerasan jaling Roda 4	Kp. Situ Leles s/d Cibeber Desa Mekarmukti	1 Km x 2,5 m	300.000.000	PUPR
	Desa Sukalaksana								
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana Prasarana Publik	Pengaspalan Jalan Lama Genteng - Pilar	Genteng - Pilar Desa Sukalaksana	3 X 3000m	250.000.000	BINAMARGA PROVINSI
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana Prasarana Publik	Pengaspalan Jalan Roda 4 Pilar Patok Beusi	Rw 09 Desa Sukalaksana	2,5 X 9000m	200.000.000	PUPR
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana Prasarana Publik	Tpt Jalan Desa	Pilar - Pamoyanan Desa Sukalaksana	2 x 500 m	100.000.000	PUPR
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana Pendidikan	Pembangunan Manarul Huda	kp Ranca Desa Sukalaksana	7 x 5 m	100.000.000	KANWILDIKBUD PROVINSI

5	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Pembangunan Pipanisasi Sarana Air bersih	Kp Pamoyanan Desa Sukalaksana	200 m	200.000.000	PUPR
6	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana prasarana Pemukiman	Pembangunan RUTILAHU	Tiap Dusun di Desa Sukalaksana	30 unit	300.000.000	PUPR PROVINSI
7	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Pembangunan Batas Kabupaten	Kp. Kidang Desa Sukalaksana	1 Paket	200.000.000	PUPR
Desa Mekarmulya									
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan Rawayan Leuwi Gandol	RW.06 Cigembong Desa Mekarmulya	43 x 3 x 8 m	1.000.000.000	PUPR
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan/Reha GOR Desa	RW.01 Genteng Desa Mekarmulya	1 UNIT	600.000.000	PUPR
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana			Peningkatan Infrastruktur Daerah	PEMBANGUNAN PAMSIMAS /PIPANISASI AIR BERSIH	4 KEDUSUNAN Desa Mekarmulya	8.000 m	800.000.000	PUPR
Desa Sukamulya									

1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan Beton	Cikiruh Desa Sukamulya	2 unit	350.000.000	PUPR
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pengaspalan Jalan Desa	Cilipung-Cikiruh Desa Sukamulya	3 KM	1.500.000.000	PUPR
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jalan Poros Desa	Cibungur-Ranca pelem Desa Sukamulya	1.5 KM	350.000.000	PUPR
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jalan Desa baru	Pasir Hayam-Cikiruh Desa Sukamulya	3.5 km	700.000.000	PUPR
5	Peningkatan Infrastruktur Daerah			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Perbaikan Jalan Lama Kab/Prov	Pilar-Talegong/sasak Desa Sukamulya	5 KM	300.000.000	PUPR
6	Peningkatan Infrastruktur Daerah			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pengalihan jalan Kabupaten	Pamorotan/Talegong Desa Sukamulya	2 KM	1.800.000.000	PUPR

7	Peningkatan Infrastruktur Daerah			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT Lingkungan	Kp. Pasir Awi Desa Sukamulya	600 M	650.000.000	PUPR
Desa Mekarwangi									
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pemasangan lampu penerangan jalan Desa tiap lingkungan Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	6 unit	100.000.000	APBD PROV
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan jembatan cikopeng hilir Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	1 unit	250.000.000	APBD PROV
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Rabat beton Jalan Lingkungan Gandasoli-Cihuni Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	1.000 m	200.000.000	APBD KAB
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Rabat beton Jalan Lingkungan Babakan Tpar- cipait	Desa Mekarwangi	800 m	170.000.000	APBD KAB

	merata				Desa Mekarwangi				
5	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembukaan Jalan Baru. kp Cikopeng - Munjul RW/RW 06/05 Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	800 m	170.000.000	APBD KAB
6	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT SDN Mekarwangi 2 Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	200 m	150.000.000	APBD PROV
7	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT Jalan kadusunan Kp. Cikopeng Hilir	Desa Mekarwangi	200 m	185.000.000	APBD PROV
8	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT Jalan kadusunan Kp. Cipait Desa	Desa Mekarwangi	150 m	165.000.000	APBD PROV

					Mekarwangi				
9	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan TPT Jalan kadusunan Kp. Cikopeng girang Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	150 m	165.000.000	APBD PROV
10	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Perbaikan Saluran air / Drainase jalan Desa Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	2.000 m	200.000.000	APBD KAB
11	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pengaspalan jalan Desa Babakan Tipar-Cikawung sepanjang Desa Mekarwangi	Desa Mekarwangi	2.000 M	350.000.000	APBD PROV
12	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan Jalan lingkungan Kp, Lembur picung Desa	Desa Mekarwangi	2000 m	350.000.000	APBD PROV

					Mekarwangi				
	Desa Selaawi								
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Meningkatkan Akses Transportasi	Pembukaan Jalan Baru	Kp. Cislada - Cinyatuh RT 06/02	1500 x 3 m	100.000.000	Dinas PUPR
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Mekar Hanja RT 02/07	60 x 3 m	100.000.000	Dinas Perkim
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Sirah Cibinong RT 04/07	350 x 3 m	450.000.000	Dinas Perkim
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Kualitas Infrastruktur secara merata	Pembangunan Perkerasan Jalan Usaha Tani	Kp. Gadobangkon RT 06/02	1000 x 2,5 m	150.000.000	Dinas PUPR
5	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Kualitas Infrastruktur secara merata	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Tersebar di 26 RT	2600 x 1 m	500.000.000	Dinas Perkim

6	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Urug RT 07/08	50 x 3 m	190.000.000	Dinas Perkim
7	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Kualitas Infrastruktur secara merata	Pengaspalan Jalan Cipeusing - Pasir Koja	Dusun Cinyawar	1500 x 2,5 m	200.000.000	Dinas PUPR
8	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT SDN I Selaawi	Kp. Selaawi RT 01/01	40 x 3 m	150.000.000	Dinas Perkim
9	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Kualitas Infrastruktur secara merata	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten Sukamulya, Mekarmulya Selaawi dan Mekar Mukti	Desa Sukamulya, Mekarmulya, Selaawi dan Mekarmukti	17 Km	5.706.616.000	Dinas PUPR
10	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Kualitas Infrastruktur secara merata	Pembangunan Jalan Lingkungan	Kp. Sawah RT 01/01	400 m	50.000.000	Dinas Perkim

11	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Untuk memperlancar genangan air	Pembangunan Drainase	Kp. Selaawi RW 01	1500 m	750.900.000	Dinas Perkim
12	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Cinyawar RT 02/03	3 x 50 m	200.000.000	Dinas PUPR
13	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Genggong RT 06/08	4 x 30 m	100.000.000	Dinas PUPR
14	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Selaawi RT 01/01	5 x 30 m	220.000.000	Dinas PUPR
15	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Penahan Tanah dari longsor	Pembangunan TPT	Kp. Selaawi RT 01/01	6x 40 m	250.000.000	Dinas Perkim
16	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara			Peningkatan akses Penerangan Jalan	PJU Jalan Kabupaten	Desa Sukamulya, Mekarmulya, Desa Selaawi dan	200 Unit	400.000.000	PT PLN Persero

	merata					Mekarmukti			
	Desa Sukamaju								
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Pembangunan jalan poros Kecamatan	SUKAMAJU-NYALINDUNG	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran drainase lingkungan	Kp.Kompak RT 06 RW 3	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran drainase lingkungan	Kp.cisumur RT 04 RW 10	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR
4	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran drainase lingkungan	Kp.Cihaur RT 1 RW 4	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR
5	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran drainase lingkungan	Kp.Nagrog RT 1 RW 1	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR

6	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran drainase lingkungan	KP.Sawah Lega RT 03 RW 11	1 PAKET	200.000.000	DINAS PUPR
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA									
Desa Mekarmukti									
1	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Permodalan UKM	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Kel	250.000.000	Dinas Katahanan Pangan
2	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, dagpeternakan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Pengadaan Bibit Domba	Meningkatkan Perekonomian	Desa Mekarmukti	250 Ekor	500.000.000	Dinas peternakan
3	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdaginas ESDM, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Traktor	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Unit	250.000.000	dinas ESDM

4	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, ESDM, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Permodalan Bibit Kayu	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Kel	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
5	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, ESDM, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Home Industri Jahit	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	5 Kel	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
6	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Pupuk Pertanian	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Kel	150.000.000	Dinas Pertanian
7	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Bibit Padi Unggulan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Kel	150.000.000	Dinas Pertanian
8	peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Bantuan Sapi Daging	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Desa Mekarmukti	25 Kel	250.000.000	Dinas Perternakan

	lainya				Masyarakat				
	Desa Sukalaksana								
1	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Bibit Ternak Domba	Tiap Dusun di Desa Sukalaksana	3 Poktan	150.000.000	DINAS PETERNAKAN
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Modal Usaha Simpan Pinjam Masyarakat	Tiap Dusun di Desa Sukalaksana	1 Kelompok	100.000.000	DPMD/ DINAS KOPRASI DAN UKM
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan pengrajin Gula Aren	Tiap Dusun di Desa Sukalaksana	8 Poktan	150.000.000	DPMD/ DINAS KOPRASI DAN UKM
	Desa Mekarmulya								

1	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	BANTUA MODAL KELOMPOK USAHA PENGRAJIN ( UMKM )	DESA MEKARMULYA	5 KELOMPOK	100.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	PENAMBAHAN MODAL BUMDES TINGKAT RT	DESA MEKARMULYA	26 RT	260.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan Gedung/ Pengadaan Alat Pengolahan Sampah	DESA MEKARMULYA	1 UNIT	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri,			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	PENGADAA N MESIN PENGOLAH AN PUPUK	DESA MEKARMULYA	1 UNIT	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya				ORGANIK				
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	BANTUAN DANA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT	DESA MEKARMULYA A	1 UNIT	200.000.000	DINAS PERTANIAN
Desa Sukamulya									
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi Cikabuyutan 1	Kp. Cikiruh-Nangewer Desa Sukamulya	2 KM	650.000.000	PUPR
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi Cikabuyutan 2	Kp. Talegong Desa Sukamulya	2 KM	650.000.000	PUPR
3	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan Irigasi Curug Luhur	Kp. Cibatuh Desa Sukamulya	1.5 KM	450.000.000	PUPR

	merata								
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Optimalisasi BUMDES	Desa Sukamulya	1 unit	350.000.000	DPMD
5	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, Kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda olah raga			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Optimalisasi Pivanisasi air bersih	Kp. Pasir Awi Desa Sukamulya	2.5 KM	650.000.000	PUPR
6	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi Pasir Hirung	Kp. Pasir hirung Desa Sukamulya	2 KM	550.000.000	PUPR
7	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan,			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan pasar modern	Kp Talegong Desa Sukamulya	1 unit	1.250.000.000	Dinas Perdagangan /pasar

	pariwisata dan jasa produktif lainnya								
	Desa Mekarwangi								
1	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi Untuk mengairi sawah cikopeng hilir	Desa Mekarwangi	1000 m	150.000.000	APBD PROV
2	Peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah secara merata			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan an Das	Desa Mekarwangi	50 m	150.000.000	APBD KAB
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pengadaan peralatan pendukung alat pertanian	Desa Mekarwangi	1 UNIT	150.000.000	APBD KAB

4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi tadahujan untuk mengairi sawah blok Darat	Desa Mekarwangi	1000 m	170.000.000	APBD KAB
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pengadaan bibit kayu untuk penghijauan lahan keritis	Desa Mekarwangi	10000 pohon	135.000.000	APBD KAB
6	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pembangunan irigasi Untuk mengairi sawah cikopeng hilir	Desa Mekarwangi	1000 m	175.000.000	APBD KAB
7	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif			Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pengadaan Modal kelompok UKM	Desa Mekarwangi	2 Kelompok	200.000.000	APBD PROV

	lainnya								
	Desa Selaawi								
1	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan SDM para Petani	Pelatihan Kelompok Tani	Desa Selaawi	11 Kelompok	11.000.000	Dinas Pertanian
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Pemberdayaan Petani	Pengadaan Bibit Kayu dan Buah-buahan	Kp. Selaawi III RT 06/02	10.000 Pohon	50.000.000	Dinas Pertanian
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan produksi para Petani	Pembangunan Irigasi	Kp. Cinyatuh RT 06/04	1000 x 1 m	501.400.000	Dinas Pertanian

4	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, Kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			Terpenuhinya sarana air bersih	Pembangunan Sumur Bor	Kp. Selaawi RT 01/01 Desa Selaawi	1 Unit	240.000.000	Dinas Perkim
5	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan usaha panday Besi	Bantuan Modal Pengrajin Pandai Besi	Kp. Kanewana RT 05/08	1 Paket	20.000.000	Dinas Koprasi dan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Pelatihan Kelompok UMKM	Desa Selaawi	1 Kelompok	10.000.000	Dinas Koprasi dan UMKM
7	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Produksi Para Petani	Pengadaan Bibit Jahe	Desa Selaawi	11 Kelompok	110.000.000	Dinas Pertanian
Desa Sukamaju									

1	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Produksi Para Petani	Jaringan irigasi usaha tani	Kp.Cikole RT 04 RW 011	1 PAKET	200.000.000	DINAS PERTANIAN
2	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Produksi Para Petani	Jalan usaha tani	Kp.Cilanggeng RT 03 RW 05	1 PAKET	200.000.000	DINAS PERTANIAN
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Produksi Para Petani	Jalan usaha tani	Kp.Cisigung RT 03 RW 05	1 PAKET	200.000.000	DINAS PERTANIAN
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya			Peningkatan Produksi Para Petani	Jalan usaha tani	Kp.Citeureup RT 01 RW 05	1 PAKET	200.000.000	DINAS PERTANIAN

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

## 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Talegong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Talegong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Talegong Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Talegong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Talegong**  
**Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

### 3. Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Talegong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Talegong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Talegong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Talegong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Talegong diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Talegong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Talegong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Talegong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Talegong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Talegong Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Talegong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Talegong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 800.684.600,-.

Adapun Program Kecamatan Talegong Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Talegong pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2 Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD

5.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

5.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

5.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.1.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.1.13 Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.1.14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.1.15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.1.16 Penyediaan Bahan/Material

1.4.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

## 5.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.2.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPS
- 5.2.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD
- 5.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran pada SKPD

## 5.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.3.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.3.2 Pengadaan Mebel
- 5.3.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.3.4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.3.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 5.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 5.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 5.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.2 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal terkait

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ii. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.3.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Intansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum

2.3.2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2 Fasilitas Pengembangan Uaha Ekonomi Masyarakat

3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan

3.2.1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

- 3.2.2 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Di tingkat Desa dan Kelurahan
- 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan
  - 3.3.1 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup bersih dan Sehat
  - 3.2.2 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Di tingkat Desa dan Keluraha
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - 5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - 6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 6.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa

- 6.1.4 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- 6.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 6.1.6 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 6.1.7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 6.1.8 Fasilitasi Penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Talegong

lembar 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Urusan Wajib								
07:01	Bidang Urusan Pemerintahan								
07:01:39	Kecamatan Talegong				7.177.814.276				6.280.334.600
7.01.01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	6.489.921.846	DAU		-	5.566.834.600
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			32.887.600	DAU			46.500.000
7.01.01.201.01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Talegong	6 Dokumen	32.887.600	DAU		6 Dokumen	46.500.000
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.024.173.246	DAU		-	2.051.499.800
7.01.01.202,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan 17 orang	1.976.173.546	DAU		12 bulan 17 orang	2.000.000.000
7.01.01.202,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Keuangan Akhir	Kecamatan	12 bulan 1	8.999.900	DAU		12 bulan 1	12.500.000

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD	Talegong	dokumen				dokumen	
7.01.01.202,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	"Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran tersedia	Kecamatan Talegong	3. Dokumen	38.999.800	DAU		3. Dokumen	38.999.800
<b>7.01.01.203</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	13.191.400	DAU		-	18.000.000
7.01.01.203,04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan BMD	Kecamatan Talegong	1. Dokumen	5.907.400	DAU		1. Dokumen	9.000.000
7.01.01.203,09	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	Kecamatan Talegong	1. Dokumen	7.284.000	DAU		1. Dokumen	9.000.000
<b>7.01.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>37.752.500</b>	<b>DAU</b>		-	<b>27.484.800</b>
7.01.01.205.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakai Dinas dan perlengkapannya	Kecamatan Talegong	24 Stel	15.627.500	DAU		24 Stel	12.484.800
7.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kecamatan Talegong	2 orang	22.125.000	DAU		2 orang	15.000.000
<b>7.01.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>205.722.500</b>	<b>DAU</b>		-	<b>332.100.000</b>
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Talegong	5 jenis	7.774.200	DAU		24 jenis	9.000.000
7.01.01.206,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Talegong	3 Jenis	45.926.400	DAU		7 jenis	120.000.000
7.01.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	Kecamatan Talegong	2 jenis	30.446.300	DAU		5 jenis	60.000.000
7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Talegong	2 jenis	18.750.000	DAU		6 jenis	22.500.000

7.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Talegong	6 jenis	6.499.200	DAU		6 jenis	6.600.000
7.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Talegong	12 bulan 875 orang	36.406.400	DAU		12 bulan 875 orang	48.000.000
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Talegong	12 bulan	59.920.000	DAU		12 bulan	66.000.000
<b>7.01.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>2.623.441.200</b>	<b>DAU</b>		-	<b>1.449.750.000</b>
7.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Talegong	2 unit motor	73.484.000	DAU		2 unit	74.750.000
7.01.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit mobil	302.100.000	DAU		0	-
7.01.01.207,05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Kecamatan Talegong	6 item	208.167.400	DAU		4 item	225.000.000
7.01.01.207,07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana Prasana Gedung Kantor yang Memadai	Kecamatan Talegong	2.Lokasi halaman	206.700.000	DAU		1.lokasi Tanah	500.000.000
7.01.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Bangunan Rumah Dinas yang memadai	Kecamatan Talegong	1 Unit Rumah Dinas	1.510.556.000	DAU		0	-
7.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Ruang Pelayanan yang memadai	Kecamatan Talegong	1. Unit Ruan, Pelayanan	222.133.800	DAU		1.lokasi Halaman	250.000.000
7.01.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Res Area/Smoking Area/Ruang terbuka yang memadai	Kecamatan Talegong	1. Unit Smoking Area	100.300.000	DAU		1.lokasi pemagaran	400.000.000
<b>7.01.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>40.660.400</b>	<b>DAU</b>		-	<b>59.000.000</b>
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kecamatan Talegong	12 bulan	20.604.800	DAU		12 bulan	24.000.000
7.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kecamatan Talegong	12 bulan	6.006.400	DAU		12 bulan	7.500.000

		terpelihara							
7.01.01.208,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Talegong	2 orang/ kegiatan	14.049.200	DAU		2 orang/ kegiatan	27.500.000
<b>7.01.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.312.093.000</b>	<b>DAU</b>		-	<b>1.282.500.000</b>
7.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Talegong	8 unit , 8 lembar	24.350.000	DAU		8 unit , 8 lembar	32.500.000
7.01.01.209,07	Penataan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Penataan Halaman gedung Kantor	Kecamatan Talegong	1.lokasi	238.434.000	DAU		1. Unit	300.000.000
7.01.01.209.09	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Ruang Pelayanan yang memadai		1.unit Gedung	200.100.000	DAU		1. Unit	50.000.000
7.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana Olah Raga yang memadai		1.unit GOR	399.999.000	DAU		1. Unit	400.000.000
7.01.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Mes Karyawan		1.unit Gedung	250.000.000	DAU		1. Unit	300.000.000
7.01.01.209.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Aset Tanah/Bangunan lainnya	Jumlah Lokasi Alun-Alun yang memadai		1.Lokasi	199.210.000	DAU		1.lokasi	200.000.000
<b>7.01.01.213</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Prosentase Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>			<b>300.000.000</b>
7.01.01.213,02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah Lokasi Pembangunan Gapura Perbatasan		1.Lokasi Gapura	200.000.000	DAU		1. Lokasi	300.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>100%</b>	<b>230.793.400</b>	<b>DAU</b>		-	<b>243.500.000</b>
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Talegong		134.760.600	DAU			145.500.000
7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan	Kecamatan Talegong	7.Desas/	134.760.600	DAU		7.Desas/	145.500.000

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
<b>7.01.02.202</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan</b>		<b>100%</b>	<b>96.032.800</b>	<b>DAU</b>			<b>98.000.000</b>
7.01.02.202.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan umum	Kecamatan Talegong	8 jenis pelayanan	45.999.200	DAU		8 jenis pelayanan	48.000.000
7.01.02.202.04	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan Pihak ketiga	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		1.lokasi	50.033.600	DAU		1.lokasi	50.000.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>90.927.780</b>	<b>DAU</b>		-	<b>107.500.000</b>
7.01.03	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>54.397.980</b>	<b>DAU</b>			<b>65.000.000</b>
7.01.03.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Talegong	1 dokumen	26.897.980	DAU		1 dokumen	32.500.000
7.01.03.02	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Talegong	Dokumen / Kegiatan	27.500.000	DAU		Dokumen / Kegiatan	32.500.000
<b>7.01.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			<b>100%</b>	<b>36.529.800</b>	<b>DAU</b>			<b>42.500.000</b>
7.01.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talegong	12 orang	24.529.800	DAU		12 orang	27.500.000
7.01.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok UMKM yang terlatih	Kecamatan Talegong	7 Klpok	12.000.000	DAU		12 Klpok	15.000.000

7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>		100%	147.154.800	DAU	-	165.550.000
7.01.04.201	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			100%	147.154.800	DAU		165.550.000
7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sinergitas ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Talegong	12 bulan/ 7 Desa / 1 Kegiatan	87.000.000	DAU	12 bulan/ 7 Desa / 1 Kegiatan	99.000.000
7.01.04.201.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	Kecamatan Talegong	2 kegiatan	60.154.800	DAU	2 kegiatan	66.550.000
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>		100%	120.000.000	DAU		132.100.000
7.01.05.201	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			100%	120.000.000	DAU		132.100.000
7.01.05.201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Talegong	12.Bulan/ 7. Desa/ Kegiatan	120.000.000	DAU	12.Bulan/ 7. Desa/ Kegiatan	132.100.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>		100%	53.450.000	DAU		64.850.000
7.01.06.201	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				53.450.000	DAU		64.850.000
7.01.06.201.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	Kecamatan Talegong	7 Desa / 1.Kegiatan	24.000.000	DAU	7 Desa / 1.Kegiatan	26.400.000
7.01.06.201,02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Talegong	7 Desa / 1.Kegiatan	17.450.000	DAU	7 Desa / 1.Kegiatan	19.450.000
7.01.06.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi penyusunan APBDes	Kecamatan Talegong	7 Desa / 1.Kegiatan	6.000.000	DAU	7 Desa / 1.Kegiatan	9.500.000
7.01.06.201.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah sosialisasi penegakan	Kecamatan	7 Desa /	6.000.000	DAU	7 Desa /	9.500.000

	PeraturanPerundang-Undangan	perda di kecamatan	Talegong	1.Kegiatan				1.Kegiatan	
	<b>JUMLAH</b>				<b>7.177.814.276</b>				<b>6.280.334.600</b>

Sumber Dari <https://garutkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>  
(Penetapan Rancangan Akhir RKPD)

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Talegong Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut sebesar Rp. 8.000.684.600,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.910.234.600,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 49.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.951.499.800,-
- Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 39.484.800,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 580.500.000,-

- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.069.750.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 64.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air,

listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.132.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 343.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan

Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 195.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 48.000.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 235.500.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 62.500.000,-
- Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 176.500.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 176.500.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target

kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 4.2 Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Capaian Program : Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Trantibum

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.399.700,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 182.100.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 182.100.000,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target

kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan 182.100.000

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 153.350.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

### **6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 153.350.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 100

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Talegong

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 8.000.684.600,- (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah),

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di implementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Talegong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Adapun Rencana Kerja/Kegiatan Tahun2023 dapat di lihat di Matriks Cetakan Akhir Renja/Penetapan dalam SIPD:

**Matriks  
Cetakan Akhir Renja/Penetapan SIPD  
Kecamatan Talegong**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Talegong  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Talegong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>															
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun ya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamata n	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly a	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 90 B	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaa n SKPD	100 %	20,000,000

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusun ya Dokumen Perencan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusun ya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusun ya Dokumen Perencan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	0
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusun ya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun ya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 90 B	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	6,000,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 90 B	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	100 %	7,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1,951,499,80</b>		<b>2,057,000,00</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikat	Tolok Ukur		Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	01 Dokumen Administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	17 Orang/bul	17 Orang	1,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokumen Administrasi	01	2,000,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01 Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang menerima	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	1 Laporan	17 Orang	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokumen Administrasi Keuangan	01	15,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	01 Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang menerima	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	01 % 100 %	12 Laporan	17 Orang	38,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01 Dokumen Administrasi Keuangan	01	42,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>24,000,000</b>		<b>34,000,000</b>		

7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 % 85 B 100	12 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	100 % 8	12,500,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 % 85 B 100	12 Laporan	1 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	100 % 8	12,500,000

7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	10 0 % 85 B 10 0	12 Laporan	1 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administarsi Barang Milik Daerah Nilai Sinergitas Kecamatan Persentase Pemenuhan	1 0 0 %	9,000,000
---	----	----	------	----	---	--	--	---	---------------------------------	------------------------------------	------------	-----------	-----------	--------------------------------------	--	------------------	-----------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								39,484,800			<b>42,484,800</b>		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	1 0 0 % 1 0	25 Paket 100 %	1 Laporan	12,484,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase Sumber Daya	1 0 0 %	12,484,800

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan		1 0 0 %	3 Orang 3 Orang	1 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase Sumber Daya	1 0 0 %	15,000,000
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan		1 0 0 %	1 Dokumen 240 Orang	1 Laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Prosentase Sumber Daya	1 0 0 %	15,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>580,500,00</b>			<b>515,500,000</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	5 Jenis	12 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	9,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Item pengadaan Kebutuhan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	37 Jenis	12 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	120,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	7 Jenis	12 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	60,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	1 Paket	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	0

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	2 Paket	12 Dokumen	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	12,500,000	
					<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2023</b>					<b>Catatan Penting</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun</b>				
<b>Kode</b>						<b>Capaian Program</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Lokasi Output Kegiatan</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>			<b>Pagu Indikatif (Rp.)</b>		<b>Sumber Dana</b>	<b>Target Capaian</b>		<b>Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)</b>	
										<b>Program</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>			<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perangkat	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	88 eksemplar	12 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	6,000,000	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	1 Paket	12 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	200,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	1060 Orang	12 Dokumen	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	48,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang yang melaksanakan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi Umum	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	12 Laporan 400 Orang	12 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	60,000,000	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamuly	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	100 %	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>3,069,750,0</b>				<b>3,020,000,000</b>

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Pengadaan Kendaraan beroda 2	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	2 unit	1 Laporan	74,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	0
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah jenis Pengadaan kendaraan Roda 4 Jumlah Pengadaan kendaraan Operasioanl Roda 4	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Mobil 1 Unit	1 Laporan	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	320,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan kebutuhan mebel	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit 6 Jenis	1 Laporan	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	225,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	6 Unit 90 B	1 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	225,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit	1 Laporan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	500,000,000
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	3 unit 3 Unit	1 Laporan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	3 Jenis	1 Laporan	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	750,000,000
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>64,000,000</b>				<b>59,000,000</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Tagihan air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 12 bulan	3 Dokumen	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	24,000,000

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan kantor prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 100 %	3 Dokumen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	7,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pembayaran Jasa tenaga kebersihan dan Tenaga Operator komputer Non ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Laporan 2 Orang	3 Dokumen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	27,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>1,132,000,0</b>			<b>1,132,000,000</b>	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	10 Unit 10 unit	1 Laporan	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Pemeliharaan lanjutan Penataan Halaman Gedung	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Unit 500 M2	1 Laporan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	500,000,000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunja	Jumlah Pengadaan GOR/Sarana Olah Raga Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 unit 1 Unit	1 Laporan	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	600,000,000
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>343,000,000</b>					<b>363,000,000</b>
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>195,000,000</b>					<b>205,000,000</b>
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Nilai Sienrgitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Laporan 90 B	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	60,000,000

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Peningkatan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinas Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Dokumen 4 Kegiatan	2 Dokumen	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	145,000,000
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>							<b>48,000,000</b>					<b>48,000,000</b>
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	6 Jenis pelayanan 12 Laporan	1 Laporan	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	48,000,000
7	01	02	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>							<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan Penataan Ibu kota	Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Lokasi	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	50,000,000

7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Nilai Sienrgitas Kinerja	Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	1 Unit 90 B	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	60,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>235,500,000</b>				<b>270,500,00</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>62,500,000</b>				<b>67,500,000</b>	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa Jumlah	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 1 Kegiatan	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayaka	100 %	35,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Talegon, Sukamulya	100 %	7 Kegiatan 0 Laporan 1 Laporan	1 Laporan	32,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	32,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>48,000,000</b>				<b>53,000,000</b>	

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Kegiatan 1 Laporan	1 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35,000,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---------------------------------	-------	-------------------------	------------	------------	--------------------------------------	--	-------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian					
						Progr	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target			
01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	14 Kelompok 1 Laporan	1 Kegiatan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18,000,000
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.0</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>									<b>100,000,000</b>		<b>120,000,000</b>		
01	03	2.03	05	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Kegiatan	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	60,000,000

01	03	2.0045	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Pengadaan Pendukung	Jumlah laporan koordinasi dan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 12 bulan	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	60,000,000
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.0</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>								<b>25,000,000</b>				<b>30,000,000</b>
01	03	2.0076	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Jumlah laporan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	300 Keluarga 7 Kegiatan	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	30,000,000
<b>01</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>176,500,000</b>				<b>192,000,00</b>
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.0</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>176,500,000</b>				<b>192,000,00</b>
01	04	2.0011	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 bulan 12 Laporan	2 Kegiatan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibu	100 %	120,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target Capaian		Tolok Ukur	Target			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)						
01 04	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	0 Laporan 1 kegiatan	2 Kegiatan	66,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perse ntase Penangan an Gangguan	100 %	72,000,000			
<b>01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>182,100,000</b>				<b>190,0</b>			
<b>01 05</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>182,100,000</b>				<b>190,0</b>			
01 05	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah pelaksanaan kegiatan Bimtek Wawasan kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	500 Orang 7 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentas e Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum yang dilimpahk	100 %	50,000,000			
01 05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forpimcam	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	12 Dokumen 12 bulan	2 Kegiatan	132,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentas e Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	100 %	140,000,000			
<b>01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>153,350,000</b>				<b>178,8</b>			
<b>01 06</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>153,350,000</b>				<b>178,8</b>			

01	06	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Kegiatan	1 Laporan	19,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	27,450,000
01	06	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Kegiatan	1 Laporan	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	26,400,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Kegiatan	1 Laporan	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,500,000

7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Laporan 7 Kegiatan	1 Laporan	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,500,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Laporan	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35,000,000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Desa	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Laporan Kegiatan TP PKK	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	1 Dokumen 12 Laporan	1 Laporan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	32,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Prosentase Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Kab. Garut, Talegong, Sukamulya	100 %	7 Dokumen 7 Desa	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30,000,000

<b>TOTAL</b>	<b>8,000,684,600</b>		<b>8,110,334,800</b>
--------------	----------------------	--	----------------------

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Talegong mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Talegong menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Talegong melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian

sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**